

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI TIONGKOK BESERTA UPAYA PENANGANANNYA**

Dalam bab IV ini penulis akan menyampaikan mengenai beberapa fenomena yang dialami oleh Tiongkok telah memberikan ancaman baik langsung maupun tidak langsung. Ancaman tersebut sudah pasti akan membuat Tiongkok menjadi takut, merasa terancam ataupun tidak nyaman yang bisa dikatakan *insecure*. Ancaman tersebut banyak bersumber dari perselisihan antar negara di sekitar perbatasan Tiongkok. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah dari salah satunya efek letak geografis Tiongkok. Memiliki kondisi geopolitik yang sangat strategis membuat Tiongkok dihadapkan dengan 2 sisi sekaligus yaitu untung dan rugi atas hal tersebut. Keuntungan yang diperoleh Tiongkok telah disampaikan pada Bab II bagian keuntungan geopolitik Tiongkok. Dampak negatif yang ditimbulkan karena letak geografis yang saling berdekatan pun beragam dan salah satu diantaranya adalah perselisihan dengan negara tetangga.

Hipotesa berikutnya dalam Teori *Models of Military Expenditures* adalah *Fear*. Apabila diterjemahkan *Fear* memiliki arti takut, namun seperti yang telah dijelaskan oleh argumen Jasen Castillo bahwa *Fear* merupakan bukti sebuah negara meningkatkan anggaran militernya ketika negara tersebut dihadapkan dengan situasi yang mengancam kedaulatannya. Selain itu negara pasti akan mengalami ketakutan atau ketidaknyamanan dimana saat terdapat beberapa kegiatannya yang sedang tumbuh pesat, memberikan dampak yang sangat menguntungkan untuk dikemudian hari ataupun merasa mengalami mendapat ancaman dari negara lain. Penulis akan mencoba menjelaskan mengenai fenomena apa saja yang sedang dihadapi Tiongkok dan dirasa hal tersebut telah mengancam kedaulatannya sehingga pemerintah

Tiongkok tetap memutuskan untuk mengambil langkah meningkatkan anggaran militernya.

## **A. Konflik Yang Sedang Dihadapi Oleh Tiongkok**

Memiliki perbatasan langsung dengan banyak negara tidak hanya membawa dampak positif saja bagi Tiongkok, tetapi juga muncul dampak negatif. Dampak yang dimaksud tersebut adalah sering terjadi konflik diantara perbatasan negara baik karena sesuatu hal kecil ataupun yang memiliki skala besar. Tiongkok tidak bisa membiarkan begitu saja pada setiap fenomena konflik yang terjadi, karena jika dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan efek domino dan mengganggu stabilitas negara. Beberapa fenomena yang dianggap Tiongkok mengancam stabilitas dan kedaulatannya adalah konflik pada Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, serta beberapa konflik dengan negara tetangga.

### **1. Konflik Laut Cina Selatan**

Beberapa saat lalu sempat terjadi perselisihan oleh beberapa negara di wilayah perairan yang berada pada kawasan Samudra Pasifik tepatnya pada Laut Cina Selatan. Negara yang berselisih tersebut adalah Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kawasan ini diperebutkan karena memiliki potensi yang sangat besar seperti yang telah dijelaskan pada Bab II bagian keuntungan geopolitik Tiongkok. Potensi tersebut seperti letaknya yang sangat strategis dikarenakan posisinya dikelilingi oleh negara-negara dan area tersebut digunakan untuk jalur distribusi pelayaran internasional. Disamping itu kandungan akan sumber daya alam yang melimpah juga memicu klaim antar negara.

Kedaaan di Laut Cina Selatan kembali menegang dikarenakan setidaknya terdapat 5 negara yang ingin mengklaim beberapa bagian dari wilayah Laut Cina Selatan.

Setiap negara memiliki fondasi tersendiri atas apa yang ingin mereka pertahankan, tetapi semua memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan sumber daya alam serta keuntungan dan pengaruh di dalam wilayah tersebut.

Sebagai contohnya akan diambil kasus Amerika Serikat saat mengirimkan dua kapal militernya berjenis pembom yang mengelilingi di sekitar pulau Tree, Lincoln, Triton dan Woody di kepulauan Paracel. Kedua kapal tersebut telah mendekat sejauh 12 mil atau 22 kilometer dari sekitar Kepulauan Paracel, dimana pada area tersebut juga terjadi perselisihan Tiongkok dengan negara tetangga (Perdana, 2018). Secara geografis letak Amerika memang tidak berdekatan ataupun berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, tujuan pengiriman kapal tersebut adalah untuk mempertahankan perairan internasional pada Laut Cina Selatan yang terseret atas klaim Tiongkok. Setidaknya sepertiga laju logistik internasional melewati wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan kalkulasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (Chinapower, 2017). Kondisi tersebut membuat Tiongkok menganggap atas kegiatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai ancaman untuk kawasan maritim yang telah di klaim oleh Tiongkok dan status militernya menjadi siaga. Kedua belah pihak juga telah membatalkan kegiatan latihan militer bersama yang dikenal sebagai RIMPAC. Karena pada awalnya latihan tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan militer antar negara.

Kemudian Filipina juga memberikan penegasan kepada Tiongkok atas tindakan klaim wilayah yang dilakukan di Laut Cina Selatan. Filipina telah memberikan peringatan berupa ancaman perang jika Tiongkok tidak segera memperbaiki perilakunya tersebut yang langsung disampaikan oleh Alan Peter Cayetano selaku sekretaris luar negeri Filipina (South China Morning Post, 2018). Alan Peter menyampaikan jika didapati ada yang mengambil sumber daya alam disebelah

barat Filipina pada area Laut Cina Selatan, maka orang tersebut telah siap untuk berperang dengan Filipina. Selain itu Tiongkok dan Filipina juga telah terlibat perselisihan di Pulau Ayungin.

Dengan situasi aktivitas militer dan dibalik kepentingan Tiongkok atas wilayah Laut Cina Selatan serangkaian kebijakan pun diambil. Beberapa diantaranya adalah pemasangan rudal penjelajah pada tiga titik lokasi di sekitar kepulauan Spratly dan pemerintah Tiongkok memberikan sebuah pernyataan atas langkah tersebut dikatakan bahwa hal tersebut hanya bertujuan untuk defensif (Utomo, 2018). Langkah tersebut tentunya akan memberikan dampak yang signifikan untuk meraih dominasi di kawasan Laut Cina Selatan. Kedua rudal tersebut bernama YJ-12B berjenis penjelajah anti kapal dan siap untuk menyerang kapal dari jarak 546 kilometer, serta rudal kedua adalah HQ-9B berjenis penjelajah udara dengan jarak tempuh mencapai 296 kilometer. Song Zhongping sebagai mantan tentara pada korps Artileri Kedua Tiongkok juga kembali menegaskan bahwa tujuan Tiongkok menempatkan rudal tersebut untuk mempertahankan wilayahnya baik dari udara maupun laut.

Kemudian media kabar berita Vox membuat sebuah video pendek mengenai aktivitas Tiongkok dalam membangun sejumlah pangkalan militer di sekitar kepulauan Spratly beserta mengirimkan armada angkatan laut untuk melindungi kawasan tersebut. Salah satu pangkalan yang dibuat sejak tahun 2014 dan mulai beroperasi pada tahun 2014 di Pulau Fiery di dalamnya terdapat sebuah landasan pacu pesawat sepanjang 10.000 kaki, stasiun radar, sistem pertahanan misil, dan diperkirakan terdapat 200 pasukan. Selain membangun pangkalan militer di Pulau Fiery, Tiongkok juga mendirikan pangkalan militer yang lain di sejumlah pulau seperti Pulau Subi, Cuarteron, Mischief, Huges, Jhonson, dan Gaven. Tidak sampai disitu juga, Tiongkok juga menerapkan sistem pertahanan kubis atau "*The Cabbage Strategy*". Strategi

tersebut menerapkan cara mengirimkan sebanyak mungkin kapal perang untuk melindungi pulau yang di klaim dan jika ada kapal militer dari negara lain akan di blokade dengan kapal tersebut. Kemudian dalam *Cabbage Strategy* juga dilakukan pembangunan beberapa pangkalan militer guna lebih banyak dan memangkas waktu jika ingin mengirimkan bantuan kepada kapal yang sedang berjaga. Dengan demikian maka Tiongkok dapat memberikan pengaruh yang lebih luas akan kendali kontrol wilayahnya (Ellis, 2017).

*Cabbage Strategy* tersebut telah digunakan pada dua kejadian dimana saat Tiongkok berusaha mempertahankan pulau Ayungin serta pada saat kapal pembom Amerika Serikat mendekati ke Pulau Spratly dalam radius 12 kilometer. Tiongkok memberikan perilaku yang sama atas fenomena tersebut. Serangkaian pasukan, kapal perang dan kapal patroli untuk berjaga di sekitar pulau dan kapal negara lain. Tujuannya tidak akan jauh dari memblokade akses menuju pulau dan mengurangi mobilitas kapal asing.

## **2. Perselisihan dengan India dan Bhutan**

Meskipun hubungan Tiongkok dan India di dalam segala sektor terjalin dengan baik, namun perselisihan antar kedua negara pun tetap terjadi. Tidak harmonisnya hubungan kedua negara sudah terjadi semenjak tahun 1962 terlibat perang yaitu *Sino-Indian War: People's Liberation Army* dimana Tiongkok menyerang India melalui Ladakh di dekat Kashmir serta McMohan Line di Arunachal Pradesh. Lalu hubungan tetap memanas ketika Tiongkok menuduh India memasuki wilayah perbatasan antara Sikkim-Tiongkok pada tahun 1965.

Hingga pada tahun 2017 Tiongkok kembali berselisih mengenai perbatasan wilayah dengan India dan juga Bhutan dan belum menemukan titik terangnya. Perselisihan perbatasan tersebut terjadi di dataran tinggi Doklam, Himalaya. Tiongkok

juga mempersiapkan sejumlah pasukan beserta alutsista di wilayah tersebut, setidaknya terdapat 300 tentara, yang dilengkapi dengan navigasi digital, rudal anti pesawat dan peluncur roket. Hingga saat ini kedua belah pihak telah menaruh pasukan militer di wilayah masing-masing yang jaraknya hanya sekitar 150 meter (Debora, Perselisihan antara Cina dan India yang Tak Kunjung Usai, 2017).

Ketegangan juga terjadi di perbatasan Tiongkok-India tepatnya di Arunachal Pradesh. India bersikeras memasukkan Arunachal Pradesh kedalam wilayah negara bagiannya meskipun Tiongkok telah mengecamnya. Tentunya dengan memiliki sejarah yang kurang harmonis ditambah lagi dengan adanya konflik tersebut yang tidak kunjung usai hingga saat ini membuat Tiongkok juga selalu waspada dibalik hubungan kerja sama dengan India maupun Bhutan.

### **3. Konflik Tiongkok-Jepang Pada Pulau Senkaku**

Tahun 2010 muncul sebuah ketegangan di kawasan Laut Cina Timur dalam kasus perebutan kepemilikan hak atas sebuah kepulauan bernama Senkaku dalam bahasa Jepang atau Diaoyu dalam bahasa Tiongkok. Kepulauan tersebut memiliki luas area sekitar 7 km<sup>2</sup> dan berjarak dengan Tiongkok sekitar 120 mil timur laut dari Tiongkok dan juga 120 mil barat daya dari Okinawa, Jepang (Manicom, 2014, hal. 1). Sengketa tersebut sudah terjadi semenjak tahun 1895 pasca berakhirnya dari Sino-Japanese War ketika Tiongkok menyerahkan Taiwan dan beberapa kepulauan kepada Jepang dibawah Perjanjian Shimonoseki (Manyin, 2016, hal. 2). Kemudian pada tahun 1969 ditemukanlah sebuah potensi yang besar yaitu wilayah tersebut kaya akan kandungan sumber daya alam berupa minyak bumi dan hal tersebut memicu Tiongkok serta Taiwan dalam tindakan klaimnya (Jennings, 2016, hal. 2).

Baik Tiongkok maupun Jepang mempunyai pandangan atas wilayah kepulauan Senkaku bahwa terdapat kekayaan yang melimpah serta memiliki letak geografis yang strategis. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *United Nation Economic Commission for Asia and the Far East* (UNECAFE) pada tahun 1968 ditemukan kekayaan alam yang ada di kawasan kepulauan tersebut berupa sumber daya ikan yang melimpah serta adanya kandungan minyak bumi dan gas alam (Pan, 2007, hal. 72). Estimasi data dari *U.S. Energy Information and Administration*, Laut Cina Timur memiliki kandungan sebesar 70-160 miliar barel minyak bumi dan 1 sampai 2 triliun kubik gas alam (*U.S. Energy Information and Administration*, 2014).

Perselisihan antara Tiongkok dan Jepang telah dimulai sejak tahun 1970 dan belum selesai hingga sekarang. Tiongkok melayangkan protes terhadap Amerika dan Jepang karena dianggap telah merampas kekayaan serta wilayah atas kepulauannya di tahun 1972. Kemudian pada tahun 1978 keadaan kembali memanas karena Tiongkok kesal dan tidak sabar atas tindakan Jepang yang kurang cepat tanggap dalam memutuskan penandatanganan perjanjian antar kedua negara. Untuk meluapkan rasa kesal akan hal tersebut, Tiongkok mengirimkan sejumlah kapal nelayan namun didalamnya berisi lengkap senjata.

Langkah Jepang dalam membeli 3 pulau juga membuat Tiongkok semakin geram dan mempengaruhi kondisi hubungan dari kedua negara. Hingga pada tahun 2010 konflik di wilayah tersebut terus terjadi, dimulai ketika kapal Tiongkok menabrak dua kapal penjaga milik Jepang yang berujung pada penahanan kapal beserta awak kapal milik Tiongkok dan menimbulkan ketegangan kembali. Lalu pada tahun 2013 Tiongkok dengan kapal militernya melakukan penembakan radiasi fire-control radar langsung ke kapal Jepang serta dengan helikopter pasukan Jepang (Slay, 2013). Sampai saat ini Tiongkok terus melakukan kegiatan

militerisasi di kawasan Laut Cina Timur untuk mendapatkan pengaruh dan mengamankan apa yang sedang diincar. Terhitung semenjak tahun 2017 Tiongkok telah menempatkan 3 anjungan minyak di kawasan Laut Cina Timur (IPDForum, 2017). *U.S. Energy Information and Administration* juga melakukan penelitian mengenai konsumsi bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam, hasilnya Tiongkok memiliki lonjakan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan Jepang, oleh karena itu Tiongkok tetap akan terus maju untuk melakukan klaim atas kawasan Laut Cina Timur (*U.S. Energy Information and Administration*, 2014).

## **B. Strategi Tiongkok dalam Menghadapi Konflik Yang Terjadi**

Militer menjadi salah satu cara yang dapat digunakan suatu negara untuk menjaga keamanan serta kedaulatan. Dari beberapa pilihan seperti efisiensi komando militer dan modernisasi militer, anggaran militer menjadi bagian yang sangat penting dikarenakan seluruh aktivitas apabila tidak ada dana yang membantu tentu hal tersebut akan menjadi penghambat. Perilaku meningkatkan anggaran militer juga dilakukan untuk bertahan (*survive*), mengatasi rasa ketidakamanan (*insecurity*) dan menunjukkan sebuah tanda seberapa kuat negara tersebut. Disamping menaikkan anggaran militer, Tiongkok juga mengambil langkah memodernisasi alutsista serta efisiensi militernya. Dalam rangka memberikan pengaruh atau mendapatkan *bargaining position* yang kuat di dunia internasional, Tiongkok juga melakukan sebuah tindakan berupa ekspansi kekuatan militernya.

Pendanaan atau anggaran merupakan fondasi dari seluruh rangkaian suatu kegiatan maupun kebijakan. Kewaspadaan Tiongkok akan dunia luar pun semakin hari semakin meningkat guna tercapainya sebuah tujuan serta ambisi atau demi menjaga kedaulatan yang dimiliki oleh negara. Dalam kurun waktu di tahun 2013-2018 Tiongkok



sangat memperhatikan kondisi militernya. Selain karena sifat ambisi yang sedang dimilikinya, menjaga kondisi kedaulatan negara pun juga harus dipertimbangkan. Kegiatan militer Tiongkok yang semakin meningkat tentunya harus diimbangi dengan peningkatan anggaran militer.

Dalam kasus konflik di Laut Cina Selatan untuk mempertahankan posisi kekuatannya, Tiongkok harus mengerahkan upaya yang lebih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk mempertahankan atas klaim yang dilakukan, Tiongkok harus berusaha dengan besar di Laut Cina Selatan terlebih terdapat Amerika Serikat yang ikut masuk kedalamnya. Tekanan dari Amerika dan Filipina serta ambisi Tiongkok untuk menguasai dan memberikan pengaruh di dalam Laut Cina Selatan menghasilkan sebuah kebijakan berupa *Cabbage Strategy*.

Kemudian *Cabbage Strategy* terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan aktivitas dalam kegiatan militer Tiongkok. Pengiriman kapal militer sebanyak mungkin serta diikuti dengan pembangunan pangkalan militer di setiap lokasi tentunya hal tersebut akan memakan banyak anggaran. Tidak hanya itu, pembuatan pulau buatan juga pastinya telah memakan banyak biaya juga disamping dari aktivitas militer. Semua hal yang dikerahkan Tiongkok merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan hak atas Laut Cina Selatan yang sedang berusaha di klaim, mendapatkan seluruh kekayaan alam beserta potensi yang dimiliki wilayah tersebut dan memberikan pengaruh di wilayah tersebut beserta dengan menunjukkan kekuatannya di dunia internasional.

Saat kondisi berselisih dengan India pun Tiongkok harus mempersiapkan kekuatan militernya dimana hal tersebut juga akan kembali kepada anggaran militer. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Tiongkok mengerahkan pasukan yang tidak sedikit jumlahnya dan ditambah lagi dengan pemberian fasilitas-fasilitas militer didalamnya tentu aktivitas tersebut

akan menambah biaya belanja militer. Begitu juga perselisihannya dengan Jepang atas Pulau Senkaku, dimana Tiongkok juga harus mempertahankan atas usaha klaimnya dan terlebih lagi Amerika Serikat ikut turun tangan kembali dalam sengketa ini.

Selain itu aktivitas militer Tiongkok lainnya juga harus dipertimbangkan seperti pembangunan pangkalan militer di Djibouti. Pangkalan militer tersebut merupakan pangkalan pertama Tiongkok di luar negeri dan terletak pada tanduk Afrika dimana lokasi tersebut sangat strategis. Tiongkok dikabarkan memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya strategi *String of Pearls*, dimana hal tersebut merupakan sebuah teori geopolitik yang memiliki dugaan bahwa Tiongkok akan memberikan pengaruh serta memberikan pengaruh atas kawasan Samudra Hindia karena terdapat saluran komunikasi militer dari dataran Tiongkok hingga pelabuhan di Sudan melalui jalur bawah laut (Christiastuti, 2017). Pangkalan militer Djibouti nantinya akan memiliki beberapa fasilitas seperti landasan helikopter, hanggar pesawat serta ditargetkan dapat menampung pasukan sebanyak 10 ribu tentara dan kekuatan militer pertama yang di kirim ke Djibouti telah dikirimkan pada bulan Juli 2017 silam (BBC News, 2017). Tidak sampai disitu, Tiongkok juga mengincar Vanuatu dan Pakistan sebagai proposal selanjutnya untuk membangun pangkalan militer di luar negeri.

Tiongkok juga melakukan kebijakan peningkatan kekuatan militer atau *upgrade* militer. Seperti pada rudal darat Dongfeng-21 yang ditempatkan di Gunung Baekdu memiliki jarak tempuh 1.700 hingga 2.100 kilometer kemudian ditambahkan kekuatannya berupa perpanjangan jarak tempuh menjadi 3.000, sehingga dengan peningkatan tersebut rudal Dongfeng-21 tidak hanya menjangkau Jepang tetapi juga sampai kapal induk Amerika Serikat yang berada di Guam. Selain itu rudal tersebut juga ditingkatkan dapat mengangkut nuklir hingga 200-500 kiloton dan mampu merubah jalur

sasaran sebelum mencapai target (Ervianto, 2015). Modernisasi juga dilakukan pada angkatan laut atau *PLA Navy* berupa pengoperasian kapal selam dengan jenis 4 kapal *nuclear-powered ballistic missile submarines* (SSBN), 5 *nuclear-powered attack submarines* (SSN) dan 47 *diesel powered attack submarines*. Angka tersebut telah disetujui akan ditingkatkan menjadi 69 hingga 78 kapal selam. Tiongkok juga terus meningkatkan rudal jelajahnya yang berjenis *anti-ship cruise missile* (ASCM) yang nantinya akan dipasangkan pada tiap kapal selam. Demi memaksimalkan potensi penuh dari rudal jenis ASCM, Tiongkok juga berinvestasi dalam teknologi sistem pengintaian, komando, pengawasan, kontrol, operasional, dan komunikasi agar dapat mengendalikan rudal tersebut (Office of the Secretary of Defense, 2018, hal. 29-30).

Kemudian angkatan udara juga telah mulai memproduksi secara massal pesawat siluman generasi ke-5 bernama J-20 yang diproduksi oleh *Chengdu Aerospace Corporation* (CAC) (Gady, *China's First 5th Generation Fighter Moves Into Serial Production*, 2017). Pesawat J-20 tersebut nantinya akan mengimbangi pesawat F-117 Nighthawk milik Amerika Serikat dengan dibekali teknologi baru berupa mesin ganda, dirancang untuk misi tempur jarak jauh, dan dilengkapi dengan rudal yang berteknologi *beyond visual range missile in an air to air missile* (BVRAAM) dimana sanggup menjelajah lebih dari 37 Km. Pada tahun 2015 Tiongkok juga mengembangkan alat tempur berjenis balon udara bernama *Yuanmeng* yang memiliki kemampuan sebagai alat pengintai yang lebih canggih, sebagai penyedia fasilitas jalur komunikasi meskipun telah dikacaukan oleh musuh (Gady, *Is This China's Newest Tool To Thwart US Military Power?*, 2015).

Keseluruhan atas hal yang dilakukan tersebut bertujuan tidak lain adalah untuk kepentingan pribadi atau *national interest* bagi Tiongkok. Anggaran militer tetap

ditingkatkan karena segala usaha yang diterapkan juga tidak memiliki biaya yang murah. Tidak bisa hanya dilihat dari jumlah militer yang dikerahkan, tetapi dari pembangunan pangkalan beserta penambahan fasilitas militer, serta aktivitas durasi waktu yang terus berjalan hingga bertahun-tahun pun harus dipertimbangkan. Secara tidak langsung pun Tiongkok juga telah melakukan persaingan baik dalam beberapa bidang senjata militer ataupun dari militer secara keseluruhan. Terlebih lagi belum armada militer yang sedang siaga menjaga keamanan di dalam Tiongkok sendiri.

Tentunya dari serangkaian kebijakan beserta langkah yang telah diambil Tiongkok tersebut telah dipertimbangkan dengan matang. Peningkatan anggaran militer sangatlah diperlukan, karena untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi serta meningkatkan kekuatan militer membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tujuan dari langkah yang diambil tersebut tidak lain adalah untuk mencapai kepentingan nasional negara Tiongkok sendiri. Disamping itu seperti yang telah disampaikan oleh Jason Castillo bahwa terdapat prinsip *self-help* dimana negara tidak bisa mengukur dan membandingkan secara pasti kekuatan atau tingkat keamanan internasional dikarenakan tidak ada pemerintahan di atas pemerintahan lagi. Oleh karena itu dengan hati-hati negara harus bisa mengukur posisi kekuatannya di dunia internasional.

Apabila berbicara mengenai tindakan dan kebijakan yang telah dilakukan Tiongkok, hal tersebut merupakan pilihan paling tepat atau rasional yang telah dilakukan sesuai dengan Teori *Rational Choice*. Kebijakan yang diambil Tiongkok dalam meningkatkan anggaran militer merupakan pilihan yang paling rasional jika dibandingkan dengan tidak meningkatkan anggaran atau menurunkan anggaran militernya. Karena pada dasarnya keputusan akan pilihan tersebut berdasar pada prinsip kegunaan maksimum atau *maximum utilization* yang mempertimbangkan analisis untung

rugi. Tiongkok sendiri memiliki *national interest* beserta ambisinya dan meningkatkan anggaran militer adalah langkah yang tepat untuk mencapai target tersebut. Selain melakukan ekspansi dan mengatasi persoalan di luar negeri, kapasitas militer Tiongkok juga bisa dikatakan besar karena menduduki peringkat ke 3 di dunia. Dengan kekuatan sebesar itu tentunya akan berbanding lurus dengan biaya perawatan yang tidak sedikit pula. Selain itu Tiongkok dapat dan telah membuktikan bahwa kekuatan militer yang dimilikinya sekarang ini mengalami peningkatan semakin kuat dan tidak bisa dianggap remeh di dunia internasional.